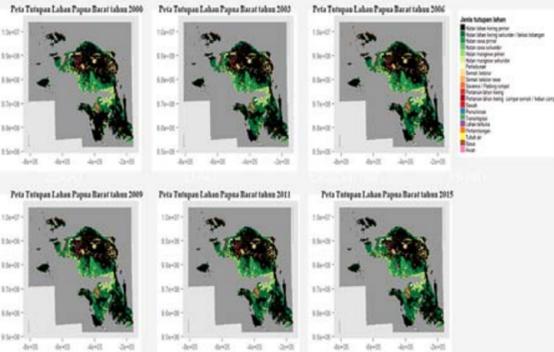


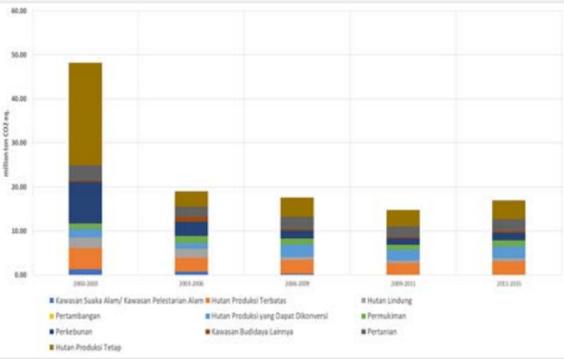
Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB (panel kiri) dan PDRB per-kapita terhadap nilai Shannon Index dari sektor-sektor ekonomi (panel kanan)

Konsekuensi atas komitmen untuk menjadi provinsi konservasi adalah memastikan bahwa setiap upaya pembangunan yang dijalankan di Papua Barat senantiasa mempertimbangkan semua pilihan beserta timbal-balik terbaik bagi penduduk dan kekayaan alam yang ada di Papua Barat. Semua pilihan tersebut perlu dikaji dengan baik agar mampu membawa Provinsi Papua Barat kepada pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Upaya, pemikiran dan proses perencanaan yang sedang dijalankan, akan bermuara pada tahapan implementasi. Rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau akan menjadi panduan dalam memacu dan memastikan koordinasi serta kerjasama yang erat antar lembaga pemerintah dan mitra-mitra pembangunan di Papua Barat. Salah satunya adalah dalam merancang dan menerapkan berbagai bentuk investasi hijau yang bukan saja mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Papua Barat, namun juga memastikan keberlanjutan sumber daya alam.



Analisa terhadap peta tutupan lahan provinsi Papua Barat tahun 2000-2015 juga memperlihatkan perubahan tutupan lahan yang dinamis. Berkurangnya tutupan hutan alam akibat konversi lahan menjadi perkebunan dan pertanian jelas terlihat. Perubahan hutan alam primer menjadi hutan alam sekunder akibat proses ekstraksi kayu juga nampak secara jelas pada peta seri waktu tutupan lahan tersebut. Hampir semua perubahan lahan yang terdeteksi membawa dampak negative terhadap lingkungan, sekalipun semua perubahan tersebut juga menghasilkan manfaat ekonomi yang tidak sedikit. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh perubahan penggunaan lahan adalah emisi gas rumah kaca. Tingkat emisi yang dihitung berdasarkan perubahan cadangan karbon di bentang lahan, memperlihatkan kecenderungan tingkat emisi yang cenderung turun, sekalipun jumlahnya cukup tinggi. Sebagian besar emisi gas rumah kaca terjadi di areal-areal yang memiliki fungsi ekonomi. Diantaranya adalah hutan produksi, perkebunan dan kawasan budidaya lainnya. budidaya lainnya.



Hasil-hasil sementara ini akan segera ditindaklanjuti melalui proses penggalian informasi, data dan pengetahuan lokal tentang permasalahan pengelolaan sumber daya alam di Papua Barat. Konsekuensi atas komitmen untuk menjadi provinsi konservasi adalah memastikan bahwa setiap upaya pembangunan yang dijalankan di Papua Barat senantiasa mempertimbangkan semua pilihan beserta timbal-balik terbaik bagi penduduk dan kekayaan alam yang ada di Papua Barat. Semua pilihan tersebut perlu dikaji dengan baik agar mampu membawa Provinsi Papua Barat kepada pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Upaya, pemikiran dan proses perencanaan yang akan segera dijalankan, akan bermuara pada tahapan implementasi. Rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau akan menjadi panduan dalam memacu dan memastikan koordinasi serta kerjasama yang erat antar lembaga pemerintah dan mitra-mitra pembangunan di Papua Barat. Salah satunya adalah dalam merancang dan menerapkan berbagai bentuk investasi hijau yang bukan saja mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Papua Barat, namun juga memastikan keberlanjutan sumber daya alam.



Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Papua Barat adalah sebuah inisiatif yang digalang oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menghimpun seluruh inisiatif, pemikiran, data serta informasi terbaik yang dimiliki Papua Barat untuk diolah menjadi sebuah dokumen perencanaan komprehensif yang mampu menjawab dan memberikan arahan bagi perwujudan visi pembangunan berkelanjutan Papua Barat saat ini dan di masa yang akan datang.



# MENUJU PAPUA BARAT YANG AMAN, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

## Penyusunan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Papua Barat

### Pesan Kunci

- 1 Pada tanggal 19 Oktober 2015, Papua Barat telah mendeklarasikan komitmen untuk bertransformasi menjadi provinsi konservasi yang pertama di Indonesia. Hal ini tidak lain adalah perwujudan dari keinginan Papua Barat untuk mewujudkan visi Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat dengan senantiasa menempatkan pertimbangan terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Perlindungan lingkungan harus berjalan seiring dengan keberlanjutan upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Papua Barat. Oleh karena itu penting untuk memiliki rencana induk beserta peta jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang mampu menjembatani secara utuh keinginan kami untuk membangun dan komitmen kami untuk melestarikan lingkungan.
- 2 Konsekuensi atas komitmen untuk menjadi provinsi konservasi, yang kemudian berevolusi menjadi provinsi berkelanjutan, adalah memastikan bahwa setiap upaya pembangunan yang dijalankan di Papua Barat senantiasa mempertimbangkan semua pilihan beserta timbal-balik terbaik bagi penduduk dan kekayaan alam yang ada di Papua Barat. Semua pilihan tersebut perlu dikaji dengan baik agar mampu membawa Provinsi Papua Barat kepada Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang berkelanjutan.
- 3 Upaya, pemikiran dan proses perencanaan yang sedang dijalankan, akan bermuara pada tahapan implementasi. Rencana induk dan peta jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau melalui sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan serta turunannya akan menjadi panduan dalam memacu dan memastikan koordinasi serta kerjasama yang erat antar lembaga pemerintah dan mitra-mitra pembangunan di Papua Barat. Salah satunya adalah dalam merancang dan menerapkan berbagai bentuk investasi hijau yang bukan saja mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Papua Barat, namun juga memastikan keberlanjutan sumber daya alam.



### Mengusung konservasi menggapai kemakmuran

Bersama dengan Provinsi Papua, Papua Barat memiliki lebih dari sepertiga total hutan alam yang ada di Indonesia. Hal ini menjadikan Papua Barat sebagai rumah bagi berbagai ekosistem penting beserta keanekaragaman hayati di dalamnya. Pada tanggal 19 Oktober 2015, Papua Barat telah mendeklarasikan komitmen untuk bertransformasi menjadi provinsi konservasi yang pertama di Indonesia. Hal ini tidak lain adalah perwujudan dari keinginan Papua Barat untuk mewujudkan visi Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat dengan senantiasa menempatkan pertimbangan terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Perlindungan lingkungan harus menjembatani secara utuh keberlanjutan upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Papua Barat. Oleh karena itu penting untuk memiliki rencana induk beserta peta jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang mampu menjembatani secara utuh keinginan kami untuk membangun dan komitmen kami untuk melestarikan lingkungan. Visi Papua Barat diterjemahkan dalam beberapa misi pembangunan yang salah satunya adalah mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Misi ini menjadi penting karena sumber daya alam yang berlimpah adalah modal utama bagi Papua Barat untuk mewujudkan kemakmuran. Sumber daya alam tersebut perlu dikelola secara lestari untuk menjamin keberlanjutan penggunaannya di masa kini dan masa yang akan datang.

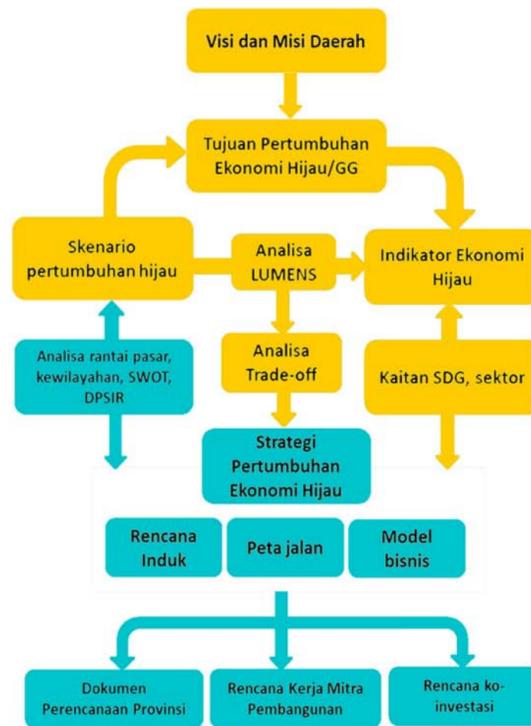
Oleh karena itu penting bagi Papua Barat untuk memiliki rencana induk beserta peta jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, dalam hal ini dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan serta turunannya, yang mampu menjembatani secara utuh keinginan untuk membangun dan komitmen untuk melestarikan lingkungan. Rencana induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Papua Barat nantinya akan menjadi panduan bersama yang akan mendasari berbagai keputusan penting terkait pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Papua Barat. Rencana induk ini akan dibangun melalui proses yang inklusif, berbasis data serta ilmu pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat Papua Barat sehingga mampu menjembatani berbagai kepentingan pembangunan sebagai satu kesatuan utuh yang integratif.

### Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Hijau?

Benturan kepentingan antara pemanfaatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan mengakibatkan berbagai dampak seperti terkurasnya sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi dan berkurangnya kemampuan lingkungan dalam menyediakan fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia yang meliputi fungsi penyokong, penyedia, pengatur, sosial-budaya dan keanekaragaman hayati. Fungsi-fungsi tersebut berkurang akibat laju kerusakan hutan alam yang terus meningkat, eksploitasi sumber daya mineral dan laut yang tidak terkendali serta aktivitas-aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals) yang dicanangkan secara bersama oleh negara-negara di dunia pada tanggal 21 Oktober 2015 berupaya mengatasi permasalahan di atas dengan menetapkan 17 tujuan pembangunan yang diharapkan mampu menjamin kemaslahatan manusia dan planet bumi di masa yang akan datang. Di Indonesia, TPB dicanangkan secara formal melalui Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di dalamnya jelas dicantumkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Untuk menjalankan tujuan mulia tersebut, keterpaduan strategi pro-lingkungan ke dalam strategi pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja merupakan aspek kunci yang membutuhkan perhatian khusus. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah bentuk konkrit dan sistematis dari penerapan TPB. Ekonomi Hijau mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan memastikan bahwa aset-aset alami mampu menyediakan sumber daya dan jasa lingkungan secara berkelanjutan untuk menopang kesejahteraan. Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang memastikan terjaganya fungsi lingkungan dengan tetap menghasilkan kemajuan pembangunan untuk kehidupan masyarakat secara adil adalah sesuatu yang diinginkan terjadi di Provinsi Papua Barat.



Pertumbuhan Ekonomi Hijau diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui sumber daya terbarukan dari sektor lahan dan turunannya dalam hal: target capaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta berkeadilan; pertumbuhan yang inklusif dan merata; ketahanan sosial, ekonomi dan budaya; pemeliharaan ekosistem yang sehat; serta penurunan tingkat emisi karbon.

Capaian target yang dipantau melalui indikator makro menjadi tolok ukur kesuksesan implementasi rencana dan peta jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau.



### Prinsip, Proses dan Langkah Teknis

Perencanaan pembangunan yang inklusif, integratif dan berbasis data serta informasi yang valid menjadi salah satu kunci untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Papua Barat. Tiga prinsip tersebut menjadi landasan utama perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau Papua Barat. Inklusif berarti melibatkan semua pihak dalam menyusun rencana pembangunan yang berlandaskan visi bersama. Integratif berarti mempertimbangkan berbagai kemungkinan serta dampak baik positif maupun negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Serta tidak kalah pentingnya, penggunaan data, informasi serta analisa yang valid berlandaskan kearifan, budaya serta pengetahuan lokal yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan serta teknologi. Ketiga hal tersebut menjadi pilar utama untuk menterjemahkan Visi Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat menjadi strategi pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan konteks Papua Barat.

Proses perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Papua Barat dilakukan dalam beberapa langkah. Langkah pertama adalah membangun pemahaman dan visi bersama semua pemangku kepentingan yang relevan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Papua Barat. Proses ini dilakukan melalui dialog, diskusi dan penyadartahuan yang akan mengawali proses bersama untuk mengumpulkan data serta informasi yang sah untuk proses perencanaan. Data yang terkumpul kemudian digunakan untuk melakukan analisa historis yang meliputi kuantifikasi perubahan penggunaan lahan dan akibatnya terhadap emisi gas rumah kaca, fungsi hidrologis, keanekaragaman hayati, ekonomi regional, profitabilitas penggunaan lahan, pendapatan dan serapan tenaga kerja. Data historis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun skenario bisnis seperti biasa, yang didalamnya tercakup pendugaan dampak ex-ante dari kondisi yang berlaku. Berdasarkan skenario tersebut disusun berbagai alternatif skenario pertumbuhan ekonomi hijau yang kemudian diperbandingkan dampaknya terhadap kondisi bisnis seperti biasa. Perbandingan dampak dilakukan dengan menggunakan analisa trade-off dari berbagai skenario pertumbuhan ekonomi hijau. Pada akhirnya skenario terbaik digunakan untuk menyusun peta jalan dan sistem pemantauan serta evaluasi dari pelaksanaan rencana pertumbuhan ekonomi hijau.



Analisa teknis pertumbuhan ekonomi hijau dilakukan dengan menggunakan alat bantu LUMENS (Land Use Planning for Multiple Environmental Services). LUMENS digunakan untuk melakukan analisa spasial, pemodelan penggunaan lahan dan kondisi ekologis bentang lahan, dan mensimulasikan berbagai skenario pertumbuhan ekonomi hijau. Melalui proses tersebut didapatkan dampak ex-ante yang sangat berguna sebagai pertimbangan pengambilan keputusan terkait pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Barat.



### Hasil-hasil Sementara

Kinerja perekonomian Provinsi Papua Barat mencapai IDR 57.29 billion (= USD 4.1 billion). Industri adalah sektor ekonomi yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Namun demikian, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi dengan biaya yang tinggi terutama berupa dampak terhadap lingkungan. Ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan, ekspansi lahan lahan pertanian, pembalakan hutan dan lain-lain adalah pemicu utama berkurangnya tutupan hutan alam di Provinsi Papua Barat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga tidak menjamin pemerataan manfaat yang berkeadilan. Pertumbuhan PDRB yang umumnya berkorelasi erat dengan Indeks Pembangunan Manusia, nyatanya tidak dinikmati secara merata oleh semua daerah di Provinsi Papua Barat. Beberapa kabupaten yang merupakan penyumbang PDRB terbesar di Papua Barat, ternyata memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang kurang lebih sama dengan kabupaten lain yang hanya menyumbangkan sedikit pertumbuhan ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berjalan seiring dengan pertumbuhan kualitas kehidupan manusia di beberapa kabupaten.

Analisa keterkaitan antara keragaman sektor ekonomi (diwakili oleh Shannon Index yang lazim digunakan untuk menilai keberagaman spesies) terhadap PDRB perkapita di Papua Barat memperlihatkan beberapa hal yang menarik. Kontribusi PDRB yang tinggi ternyata disumbangkan oleh kabupaten-kabupaten yang memiliki keragaman sektor ekonomi yang juga tinggi. Hal ini menandakan adanya keterkaitan positif antara diversifikasi aktivitas ekonomi dengan pertumbuhan daerah. Kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa upaya dan strategi untuk memperkuat hubungan antar sektor akan memberikan efek pengganda besar terhadap perekonomian Papua Barat secara keseluruhan, terutama bagi kabupaten-kabupaten yang perekonomiannya tidak semata-mata ditopang oleh ekstraksi sumber daya alam.

